

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN *SMART VILLAGE*
(DESA KALISIDI KABUPATEN SEMARANG)**

Nafil Fadlul Rahman¹, Budi Setiyono², Dzunuwanus Ghulam Manar³

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Dewasa ini, semakin berkembangnya zaman mendorong terjadinya berbagai kemajuan didalam kehidupan, salah satunya pada sektor digitalisasi. Peningkatan sektor digitalisasi tersebut menyebabkan peralihan kegiatan dan informasi dari *offline* menjadi *online*. Desa sebagai pemerintahan terkecil sekarang telah merasakan peralihan tersebut, ditandai dengan adanya Sistem Informasi Desa berbasis *website* untuk memberikan berbagai informasi dan kegiatan seputar desa. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Desa Kalisidi saat ini, Pemerintah Desa sudah menerapkan Sistem Informasi Desa kepada masyarakat yang berisikan data desa seperti data penduduk, data agama, data pendidikan, dan lainnya. Kemudian juga berisikan informasi kegiatan desa dan layanan mandiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di Kalisidi sehingga nantinya mengetahui apakah implementasi tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif yang mengambil lokasi penelitian di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Desa Kalisidi sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa, Pemerintah Desa Kalisidi sudah mengupayakan agar implementasi dapat berjalan dengan maksimal. Namun, dalam implementasi tersebut masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih ada kendala didalamnya. Faktor penyebab kendala tersebut diantaranya terkait dengan belum adanya admin tetap untuk mengelola Sistem Informasi Desa sehingga untuk saat ini dikelola oleh perangkat desa yang menjabat sebagai sekretaris desa dan kaur umum dan perencanaan sehingga belum terkelola dengan baik karena perangkat desa tersebut masih terkendala dengan waktu dan kualitas SDM, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa. Rekomendasi dari penelitian ini, yaitu hendaknya pemerintah desa segera menunjuk admin tetap agar Sistem Informasi Desa dapat dikelola dengan baik, mensosialisasikan kepada masyarakat, dan mengisi data-data kosong dan belum *update* pada Sistem Informasi Desa.

Kata Kunci: Sistem Informasi Desa, Implementasi, Desa.

ABSTRACT

Nowadays, the increasingly developing times encourage various advances in life, one of which is in the digitalization sector. The increase in the digitalization sector has resulted in a shift in activities and information from offline to online. The village as the smallest government has now experienced this transition, marked by the existence of a website-based Village Information System to provide various information and activities about the village. As currently implemented by Kalisidi Village, the Village Government has implemented a Village Information System for the community which contains village data such as population data, religious data, education data, and others. Then it also contains information on village activities and independent services. The aim of this research is to find out how the Village Information System is implemented in Kalisidi so that later you will know whether the implementation has gone well or not. The method used in this research is descriptive qualitative which took the research location in Kalisidi Village, West Ungaran District, Semarang Regency. The results of this research show that Kalisidi Village has implemented a Village Information System, the Kalisidi Village Government has made efforts so that the implementation can run optimally. However, the implementation is still not in accordance with what was expected because there are still obstacles in it. Factors causing these obstacles include the absence of a permanent admin to manage the Village Information System so that currently it is managed by village officials who serve as village secretaries and general and planning heads so it has not been managed well because village officials are still constrained by time and the quality of human resources, as well as the community's low knowledge of the Village Information System. The recommendation from this research is that the village government should immediately appoint a permanent admin so that the Village Information System can be managed well, socialize it to the community, and fill in empty and unupdated data in the Village Information System.

Keywords: *Village Information System, Implementation, Village.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan tingkatan terendah yang ada dalam sebuah pemerintahan. Menurut Widjaja, (2010) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Desa mempunyai peranan yang sangat penting karena desa menjadi target pembangunan nasional. Adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mengatur mengenai kewenangan urusan desa ditambah dengan adanya alokasi dana desa dapat membuka peluang bagi setiap desa di Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa.

Edukasi terhadap masyarakat desa sangat perlu untuk menjadikan desa tersebut menjadi desa cerdas, salah satu solusi inovatif adalah dengan melakukan penerapan konsep *smart village*. Konsep dari smart village di sini mengadopsi dari 2 beberapa konsep yang dimiliki *smart city*, namun dalam *smart village* skala konsepnya lebih kecil. Menurut Nur

Saidah, (2021) konsep *smart village* yang dianggap identik dengan kemampuan suatu desa dalam mengoptimalkan digitalisasi teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya perbaikan kualitas hidup, efisiensi, serta meningkatnya kapabilitas desa baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.² Adanya program *smart village* menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat karena masyarakat merasa mendapat keadilan dalam sektor pelayanan publik yang dianggap akan lebih transparan dan efisien.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, (2021) yaitu adapun upaya untuk mewujudkan Indonesia maju di masa depan, yaitu perlunya ada kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi bagi desa. Adanya konsep *smart village* dalam desa tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan berbagai aspek pembangunan desa. Terdapat enam pilar dari program *smart village*, diantaranya yaitu: 1. Warga cerdas (*smart people*); 2. Mobilitas cerdas (*smart mobility*); 3. Pemerintah cerdas (*smart governance*); 4. Ekonomi cerdas (*smart*

¹ Widjaja. (2010). Otonomi Desa. Depok: Raja Grafindo Persada.

² Nur Saidah, L. K. (2021). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam

Mendukung Program Smart Village. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, 123-135

economic); 5. Pola hidup cerdas (*smart living*); 6. Lingkungan cerdas (*smart environment*).

Program *smart village* sangat penting diterapkan di desa. Hal tersebut karena desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Konsep *smart village* menjadi representasi yang terbaru untuk warga desa dalam bersinergi antara budaya lokal dengan sistem informasi teknologi. Adanya 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai dasar program *smart village* dan defenisi dari *smart village* yang sesuai pada pasal 78 UU Desa tentunya adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mengencarkan program *smart village* ini ke seluruh desa yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu aktor perubahan, Pemerintah Desa harus mampu menerapkan program-program terkait dengan *smart village* kepada masyarakat, baik itu program yang dibuat Pemerintah Kota, maupun yang dibuat Pemerintah Desa itu sendiri. Salah satu bentuk dari *smart village* yaitu adanya Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa merupakan sebuah sistem yang dapat

mengelola sumber daya yang ada di sebuah organisasi³. Sistem Informasi Desa adalah bagian dari sistem informasi manajemen. Hadirnya Sistem Informasi Desa memberikan manfaat berupa kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan dan ketersediaan data. Selain itu keberadaan Sistem Informasi Desa juga bagian 5 dari pengembangan *e-government*, yaitu adanya aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah pemerintah desa untuk mendokumentasikan data yang ada di desa⁴.

Desa Kalisidi merupakan desa yang terletak di Kabupaten Semarang. Desa Kalisidi sudah mempunyai Sistem Informasi Desa dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Sistem Informasi Desa tersebut berisi profil desa yang terdiri atas sejarah desa, visi dan misi, serta struktur organisasi desa. Data desa yang terdiri dari data wilayah administratif, data pendidikan, data pekerjaan, data agama, data jenis kelamin, dan data warga negara. Regulasi yang terdiri dari produk hukum dan informasi publik. Serta yang terakhir yaitu terdapat layanan desa yang terdiri dari pembuatan akte kematian, pembuatan KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),

³ Ranggoaini, J. D. (2012). Sistem Informasi Desa Sistem Informasi dan Data untuk Pembaharuan Desa. Yogyakarta: Combine Resource Institution (CRI).

⁴ Sulistyowati, F. d. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart

Village di Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi, 213- 225.

Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Usaha, dan pambatan Surat Permohonan Perubahan KK.

Dari berbagai macam indikator yang ada pada Sistem Informasi Desa Kalisidi, dari hasil temuan peneliti masih terdapat kekurangan dalam Sistem Informasi Desa Kalisidi tersebut, diantaranya yaitu data wilayah administratif dan sejarah desa yang masih kosong, data pendidikan yang sedang ditempuh dan data pekerjaan baru di isi oleh 1 orang dan 6244 orang terdapat kalimat belum mengisi. Dari permasalahan tersebut, analisis indikator kemungkinan masih ditemukannya kekurangan dalam data isi, layanan masih belum dapat digunakan, dan kesalahan penulisan visi misi dari Sistem Informasi Desa Kalisidi hal tersebut karena belum adanya kejelasan dan keseriusan dari Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Desa Kalisidi. Maka dari itu, dalam permasalahan yang ada dengan melakukan analisis terhadap implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi nantinya akan menjawab bagaimana pelaksanaan dari Sistem Informasi Desa Kalisidi, sehingga nantinya akan ditemukan penyebab dari permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif ini dilakukan sebab dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Kalisidi sesuai dari data yang didapatkan dari informan. Situs dari penelitian ini yaitu di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Subjek yang digunakan yaitu masyarakat Desa Kalisidi dan Pemerintah Desa Kalisidi, diantaranya kepala desa, sekretaris desa, staf atau admin Sistem Informasi Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalisidi sebagai lembaga pengawas desa. Pada penelitian ini penentuan teknik subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling sebagaimana menurut Sugiyono, (2019) bahwasanya purposive sampling adalah salah satu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan melakukan berbagai pertimbangan⁵. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara, sedangkan untuk analisis dan interpretasi data menggunakan model analisis yang digunakan oleh Miles

⁵ Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

dan Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Kalisidi saat ini sedang mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu Sistem Informasi Desa. Pemerintah Desa Kalisidi menggunakan Sistem Informasi Desa Kalisidi untuk memberikan informasi, transparansi, dan pelayanan secara online kepada masyarakat. Adanya Sistem Informasi Desa ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.

Sistem Informasi Desa Kalisidi dapat diakses melalui aplikasi *google* yaitu dengan menuliskan “desakalisidi.my.id” pada halaman *google*. Dalam Sistem Informasi Desa Kalisidi terdapat beberapa fitur, diantaranya yaitu profil Desa Kalisidi, visi dan misi Pemerintah Desa Kalisidi, data Desa Kalisidi yang terdiri dari data wilayah administratif, data pendidikan dalam kartu keluarga, data pendidikan yang ditempuh, data pekerjaan, data agama, data jenis kelamin, data warga negara, dan juga terdapat layanan desa kalisidi yang terdiri

dari pembuatan akte kematian, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan ahli waris, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan surat permohonan perubahan Kartu Keluarga (KK).

Menurut Charles O. Jones (dalam Ponto, Pioh, & Tasik, 2016) terdapat 3 model Implementasi Kebijakan ⁶, diantaranya yaitu:

1. Organisasi

Organisasi merupakan tindakan membentuk atau mengatur kembali sumber daya, unit dan metode untuk melaksanakan suatu program. Berhasil atau tidaknya sebuah implementasi tergantung kepada organisasi atau pihak yang melaksanakan. Adanya kejelasan dalam struktur organisasi tentunya dibutuhkan untuk mengoperasikan program, dengan itu tenaga pelaksana bisa terbentuk dari sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi tidak adanya struktur organisasi khusus yang jelas untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa karena dalam pelaksanaannya sudah melekat pada fungsi perorangan atau bagian dari

⁶ Ponto, A., Pioh, N., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial, dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan

Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 36-52.

struktur desa. Kemudian dari perorangan tersebut juga belum ada kejelasan pengangkatan atau penunjukan siapa yang akan menjadi admin untuk mengelola Sistem Informasi Desa Kalisidi tersebut.

a. Sumber daya

Sumber daya yang penting dalam implementasi yaitu staf dengan ukuran memadai dan mempunyai skill yang mumpuni untuk menyelesaikan tugasnya, fasilitas yang cukup untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, serta adanya anggaran untuk menunjang proses implementasi.⁷

- Staf

Sumber daya diantaranya adalah jumlah staf yang cukup dalam melaksanakan kebijakan tersebut, namun jika jumlah yang cukup tidak diimbangi dengan kompetensi maka akan percuma saja. Oleh karena itu, staf harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. SDM staf dalam Implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi masih

rendah. Staf sudah memahami tugasnya, namun yang menjadi permasalahan disini yaitu belum bisa melaksanakan pekerjaannya, sehingga harus minta tolong terlebih dahulu ke salah satu Kadus untuk menuliskan artikel yang merupakan hasil kegiatan yang ada di Desa Kalisidi. Terkait dengan jumlah staf masih kurang dimana belum adanya admin tetap untuk Sistem Informasi Desa Kalisidi sehingga orang-orang yang mengurus Sistem Informasi Desa ini saat ini mempunyai jabatan strategis dalam pemerintahan desa, salah satunya yaitu sebagai sekretaris desa, sehingga beliau tidak mempunyai waktu yang cukup untuk dapat mengupdate dan fokus terhadap implementasi Sistem Informasi Desa karena mempunyai tugas yang banyak di sekretaris desa Kalisidi.

- Fasilitas

Sebaik apapun kemampuan staf organisasi sebagai implementor akan tetapi jika tidak ada fasilitas yang mendukung maka implementasi kebijakan tidak akan

⁷ Ponto, A., Pioh, N., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial, dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan

Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan , 36-52.

dapat terlaksana. Dalam implementasi sistem informasi desa Kalisidi untuk fasilitas yang digunakan seperti laptop dan jaringan internet bagi pengakses sudah mumpuni.

- **Anggaran**

Tersedianya anggaran yang mumpuni maka akan dapat membantu memudahkan dalam berbagai macam bentuk pembiayaan yang dibutuhkan, baik itu dari sisi pemenuhan sarana, prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika anggaran macet maka implementasi tersebut akan gagal, namun jika anggaran tersebut memadai maka dapat memudahkan proses implementasi kebijakan tersebut. Anggaran yang dikeluarkan yaitu untuk keperluan perpanjangan domain, selain itu Pemdes Kalisidi juga sudah merancang anggaran untuk tahun 2023 untuk keperluan Sistem Informasi Desa sudah tertera didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun dari anggaran tersebut masih terdapat bagian yang belum terserap yaitu untuk honorer admin karena memang

belum adanya admin khusus untuk Sistem Informasi Desa Kalisidi.

b. Unit Organisasi

Unit organisasi adalah bagian dari model yang lebih besar yaitu struktur. Pada saat yang sama, struktur adalah mekanisme formal dimana suatu organisasi dikelola. Menurut Handoko, dalam struktur menunjukkan kerangka dan pengaturan untuk perwujudan pola hubungan yang tetap antara fungsi, bagian atau posisi, dan orang-orang yang diberi peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berbeda dalam suatu organisasi. Tujuan dari struktur adalah untuk membagi dan mengatur kerja para anggota organisasi agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar dan mencapai maksud dan tujuan organisasi.

Dalam konsep implementasi kebijakan Jones adanya kejelasan struktur organisasi dibutuhkan untuk mengoperasikan program sehingga nantinya akan terbentuk sumber daya manusia yang kompeten. Namun, dalam implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi organisasi khusus untuk mengelola Sistem Informasi Desa Kalisidi belum ada karena masih melekat pada fungsi perorangan dalam

menjalankannya. Sehingga dalam implementasinya baru menunjuk perangkat desa yang ada dan juga belum ada admin khusus perorangan untuk mengelola Sistem Informasi Desa Kalisidi tersebut. Belum adanya admin dalam implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi sehingga membuat belum maksimalnya proses implementasi berjalan. Selain itu keterbatasan waktu juga menjadi hambatan karena staf yang terlibat juga mempunyai pekerjaan sesuai dengan jabatannya di pemerintah desa. Mereka melakukan pekerjaan dalam Implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi hanya pada saat adanya waktu luang dan kadang mereka berganti peran dalam melaksanakan tugasnya sehingga pencapaian sasaran dan tujuan menjadi terhambat.

c. Metode

Menurut Sanjaya, (2006) metode merupakan proses yang dipakai untuk mengimplementasikan rencana yang telah dibuat dengan tujuan rencana tersebut dapat tercapai dengan optimal⁸. Adanya

metode dapat meningkatkan kebermanfaatan seluruh sumber dan faktor yang menjadi acuan keberhasilan proses pengelolaan, dengan memperhatikan dinamika dan fungsi atau birokrasi untuk mencapai tujuan yang sah.

Metode yang digunakan dalam Implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi yaitu melalui informasi-informasi seperti dari pemerintah desa kepada ketua RT, kemudian ketua RT menyampaikan kepada masyarakatnya, penyampaian melalui media sosial instagram dan facebook. Selain itu juga terdapat metode penyampaian informasi pada saat adanya forum-forum warga dan juga kepada masyarakat yang datang ke kantor desa.

2. Interpretasi

Menurut Jones mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan baik maka pedoman dan pedoman pelaksanaannya tidak hanya harus dapat diterima, tetapi juga harus jelas, dan jika tidak jelas maka pelaksana

⁸ Sanjaya, W. (2006). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

akan bingung harus berbuat apa. Bagian terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan adalah adanya pemahaman dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan, baik itu dari organisasi/lembaga sebagai pembuat kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima dan pelaksana kebijakan⁹.

Menginterpretasikan sebuah kebijakan menjadi sebuah pandangan yang sama bukanlah sesuatu yang mudah sehingga perlunya ada pengenalan yang baik oleh pembuat kebijakan kepada penerima kebijakan tersebut. Berkaitan dengan interpretasi, maka yang dapat diperhatikan yaitu terkait dengan Implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi apakah sudah ada kejelasan atau belum dimana terdapat kesamaan pemahaman antara pembuat dan penerima terhadap tugas dan perannya. Dari hal tersebut proses penyampaian informasi, berupa sosialisasi dan juga kejelasan tugas adalah sesuatu yang penting dan hal tersebut dilakukan dengan komunikasi yang baik.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyampaikan dan memperkenalkan Sistem Informasi Desa Kalisidi diantaranya yaitu

mensosialisasikannya kepada masyarakat ketika adanya pertemuan remaja, melalui group whatsapp desa, melalui ketua RT dan kemudian ketua RT yang menyampaikan kepada masyarakat lingkungan sekitarnya, pada saat adanya pelayanan kepada masyarakat di balai desa, media sosial facebook dan instagram, dan pernah adanya sosialisasi launching website desa oleh tim PPK Ormawa yang mengundang kepala desa, ketua RT Desa Kalisidi, dan masyarakat.

Adanya kejelasan dari organisasi atau pemerintah sebagai pihak pembuat dan pelaksana menyampaikan sebuah kebijakan kepada masyarakat selaku penerima sehingga membuat masyarakat tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika organisasi atau pemerintah tidak mampu menyampaikan kebijakan dengan jelas maka masyarakat akan kebingungan terhadap kebijakan dari organisasi atau pemerintah itu sendiri. Sehingga kebijakan tersebut akan sulit untuk diimplementasikan.

Dalam Implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi berdasarkan

⁹ Eterna, L., Setyawan, D., & Setiamandani, E. D. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program

Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18-27.

wawancara yang telah dilakukan jawaban yang didapatkan dari informan diantaranya yaitu menurut Wawanto beliau belum paham dengan Sistem Informasi Desa Kalisidi, menurut Mursiti beliau hanya sekedar mengetahui dan belum terlalu memahami dengan jelas tentang Sistem Informasi Desa Kalisidi, sedangkan dari Kholik Mashadi dimana beliau sudah memahami adanya Sistem Informasi Desa Kalisidi. Masih adanya masyarakat yang belum memahami dan kurang paham terkait dengan Sistem Informasi Desa ini sehingga harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Masyarakat tidak akan menggunakan Sistem Informasi Desa tersebut jika mereka belum memahami kegunaan dan manfaat dari adanya Sistem Informasi Desa di Kalisidi.

3. Aplikasi

Aplikasi merupakan ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika dapat dilaksanakan, jika tidak dapat

dilaksanakan maka hanya menjadi tumpuan kertas saja¹⁰.

Dalam implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi program tersebut masih belum terlaksana dengan maksimal karena masih ditemukan kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya, kemudian dari hasil wawancara dengan masyarakat dimana masyarakat belum pernah menggunakan Sistem Informasi Desa tersebut. Sistem Informasi Desa Kalisidi mulai diterapkan pada tahun 2016. Sejak pertama diterapkan Sistem Informasi Desa Kalisidi sudah sering berganti. Pada awal mulanya dirancang oleh Pemerintah Desa namun tidak jalan. Kemudian dibentuk lagi oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di Desa Kalisidi, dan terakhir saat ini yang dibentuk oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan PPK Ormawa di Desa Kalisidi tahun 2022.

Pelaksanaan tahun pertama yaitu tahun 2016 dimana Sistem Informasi Desa Kalisidi dirancang oleh pihak pemerintah desa. Sistem Informasi Desa Kalisidi tahun 2016 berbeda dengan bentuk saat sekarang ini. pada tahun 2016 tersebut masih

¹⁰ Ponto, A., Pioh, N., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial, dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan

Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan , 36-52.

berbentuk *blogspot* belum *website*. Untuk isi yang terdapat didalamnya pada saat itu baru ada postingan-postingan terkait kegiatan pedesaan, belum ada data desa dan layanan mandiri. Namun, untuk *blogspot* tersebut tidak jalan terlalu lama dan mengalami permasalahan akses karena pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam melakukan perpanjangan domain.

Pada tahun 2019 Sistem Informasi Desa kembali dibentuk. Adapun yang menjadi perancang pada saat itu adalah dari mahasiswa Unnes yang sedang melaksanakan KKN di Desa Kalisidi. Dimana pada saat itu mereka mempunyai salah satu program yaitu terkait pembuatan *website*. Sistem Informasi Desa berbasis *website* yang dibuat oleh mahasiswa KKN sudah ada kemajuan dari yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah desa. Sebelumnya hanya berisikan postingan kegiatan desa, sedangkan untuk saat itu sudah ada data-data desa dan masyarakat didalamnya. Namun, dalam pelaksanaannya ketika mahasiswa tersebut selesai melaksanakan KKN di Desa Kalisidi setelah itu *website* tersebut tidak lagi bisa diakses karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pemerintah desa untuk pengelolaan lebih lanjut

untuk Sistem Informasi Desa berbasis *website* tersebut.

Pada tahun 2022 Sistem Informasi Desa Kalisidi kembali dibentuk oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan program PPK Ormawa dari Unnes. Pada saat itu adapun program yang dibuat adalah terkait dengan pelayanan secara online dari pemerintah desa kepada masyarakat. namun, dari pihak pemerintah desa meminta kepada mahasiswa tersebut untuk mengembangkannya lagi dalam bentuk Sistem Informasi Desa dimana didalamnya nanti juga terdapat bagian pelayanan secara *online*. Sehingga pada akhirnya dilaksanakanlah pembuatan Sistem Informasi Desa dan dari pemerintah desa turut membantu menunjukkan bagianbagian apa saja yang akan dimasukkan kedalam Sistem Informasi Desa tersebut. Sistem Informasi Desa tersebut masih digunakan hingga saat ini oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat, namun yang menjadi kendala disini yaitu terkait dengan data-data yang belum update dan bahkan masih ada yang kosong. Sementara itu untuk layanan secara online juga masih belum bisa digunakan.

Berdasarkan pernyataan dari informan dimana masih terdapat

beberapa kendala yang menjadi penghambat proses Implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi, diantaranya yaitu:

1. Belum adanya admin yang mengelola Sistem Informasi Desa
Pengelolaan Sistem Informasi Desa Kalisidi menjadi terhambat karena belum adanya penunjukan admin tetap yang mengelola, sehingga untuk saat ini Sistem Informasi Desa Kalisidi dikelola oleh perangkat desa lainnya yang juga mempunyai jabatan khusus di pemerintah desa yaitu sebagai sekretaris desa dan kaur perencanaan dan umum.

2. Waktu

Dari segi waktu ini merupakan permasalahan utama dari Implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi karena perangkat desa yang ditugaskan sementara untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa mempunyai jabatan khusus lainnya di Pemerintah Desa, diantaranya yaitu Uswatun Umami yang menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Wondo yang menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Umum. Mereka mempunyai tugas juga berdasarkan jabatan yang dimiliki sehingga tidak ada waktu untuk mengupdate dan memasukkan data

yang masih kurang pada Sistem Informasi Desa tersebut

3. Sumber Daya Manusia (SDM).

Belum adanya admin tetap Sistem Informasi Desa dan masih rendahnya kualitas SDM yang mengurus Sistem Informasi Desa saat ini juga menjadi kendala dalam implementasi Sistem Informasi Desa. Admin sementara Sistem Informasi Desa tersebut masih kurang paham dalam menulis hasil dari kegiatan desa sehingga dalam penulisan beliau kurang percaya diri dan takut ada salah dalam penulisan sehingga harus minta tolong terlebih dahulu kepada pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Mewujudkan *Smart Village* di Desa Kalisidi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Organisasi

Dalam konsep organisasi Charles O. Jones adanya kejelasan dalam struktur organisasi dibutuhkan dalam mengoperasikan program agar terbentuk sumber daya yang berkualitas. Namun, dalam implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi tidak ada organisasi khusus

yang dibuat untuk mengelola Sistem Informasi Desa karena dari pihak pemerintah desa saat ini belum terlalu fokus terhadap program tersebut sehingga jika organisasi tersebut dibentuk saat ini tentunya akan mengeluarkan anggaran untuk honor para anggota organisasi. Maka dari itu untuk saat ini Sistem Informasi Desa Kalisidi melekat pada fungsi perorangan yang dikelola oleh admin khusus, namun untuk admin tersebut belum ada sehingga saat ini ditunjuk admin sementara yaitu sekretaris desa dan kepala urusan umum dan perencanaan.

B. Interpretasi

Dalam konsep Charles O. Jones mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jika kebijakan ingin diterapkan dengan benar maka pedoman pelaksanaannya tidak hanya dapat diterima, namun harus mempunyai kejelasan dalam penyampaian kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kebingungan harus berbuat apa. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi orang-orang yang ditugaskan untuk menjalankan sudah memahami apa saja yang harus mereka lakukan, namun mereka masih kebingungan

dalam pelaksanaan. Berkaitan dengan penyampaian kepada masyarakat dimana pemerintah desa sudah melakukan berbagai upaya, namun dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yaitu terdapat masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui adanya Sistem Informasi Desa Kalisidi dan juga ada yang hanya sekedar tau namun belum memahami.

C. Aplikasi

Dalam konsep Charles O. Jones aplikasi merupakan ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika dapat dilaksanakan, jika tidak dapat dilaksanakan maka hanya menjadi tumpuan kertas saja. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi yang menjadi sasaran dari program ini yaitu masyarakat. Namun, pada kenyatannya dalam pelaksanaannya masyarakat dalam segi pelayanan masih belum bisa menggunakan pada Sistem Informasi Desa, kemudian untuk keperluan masyarakat terkait data dan informasi desa itu masih belum update dan bahkan ada beberapa data yang kosong.

SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan penelitian, maka peneliti mengajukan saran yaitu: Pertama, untuk aspek organisasi, dimana pemerintah desa harus lebih fokus lagi dalam mengurus Sistem Informasi Desa ini agar dapat membentuk sebuah organisasi, namun jika tidak memungkinkan dan menggunakan fungsi perorangan maka harus menunjuk admin khusus dalam menjalankan Sistem Informasi Desa Kalisidi. Kedua, untuk interpretasi pemerintah desa harus mensosialisasikan lagi Sistem Informasi Desa kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami sehingga mendapatkan manfaat dari adanya Sistem Informasi Desa tersebut. Ketiga, untuk aspek aplikasi pemerintah desa harus melengkapi data dan informasi yang belum update dan kosong serta membuka layanan mandiri masyarakat pada Sistem Informasi Desa Kalidi agar masyarakat dapat menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eterna, L., Setyawan, D., & Setiamandani, E. D. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18-27.
- Nur Saidah, L. K. (2021). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 123-135
- Ponto, A., Pioh, N., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial, dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 36-52.
- Ranggoaini, J. D. (2012). *Sistem Informasi Desa Sistem Informasi dan Data untuk Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: Combine Resource Institution (CRI).
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Sulistiyowati, F. d. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 213- 225.
- Widjaja. (2010). *Otonomi Desa*. Depok: Raja Grafindo Persada.